



(RENJA)

RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025



DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Anggaran tahun 2025 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

Rencana kerja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Jambi. Dengan demikian rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, dan RPD dan Renstra 2021-2026.

Rencana kerja dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sampai dengan Tahun 2024 atau di TW IV, renja kerja disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2025

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2025 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi.



Jambi, Juli 2024
KEPALA DINAS

Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19721212 199302 1 001

DAFTAR ISI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	1
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	63
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	64
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	76
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	90
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	93
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	93
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	94
	3.3 Program dan Kegiatan	99
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	155
BAB V	PENUTUP	190

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada pasal 13 ayat (2) dalam Permendagri yang sama disebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Proses penyusunan Renja dimulai dari tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan renja, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja ini berpedoman pada RKPD, Rensta Perangkat Daerah dan Renja Kementerian/Lembaga terkait yang kemudian diharapkan menjadi pedoman dalam proses penyusunan RKA, KUA PPAS dan RAPBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Identifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9000.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Identifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi Tahun 2020-2040
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
23. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA, KUA PPAS dan RAPBD Disperidag Provinsi Jambi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Secara umum pada tahun 2023, terdapat 5 indikator kinerja yang tidak memenuhi target. Sementara 7 indikator kinerja lainnya melebihi target. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Evaluasi
			Target	Realisasi	%	
1	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB	8,08	10,22	126,48 51	Melebihi Target
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	0,43	4,44	1.032,5 6	Melebihi Target
		Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan	264.755	157,39 7	59,45	Tidak Memenuhi Target
2	Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	95,00	100,00	105,26	Melebihi Target
		Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	43,25	88,71	205,11	Melebihi Target
		Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku	66,00	83,77	126,92	Melebihi Target

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Evaluasi
			Target	Realisasi	%	
		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	92,00	84,40	91,74	Tidak Memenuhi Target
		Tertib Usaha	60,00	95,00	158,33	Melebihi Target
3	Meningkatkannya Nilai Ekspor	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	1,000	0,749	74,90	Tidak Memenuhi Target
		Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	6,00	- (19,50)	- 325,00	Tidak Memenuhi Target
4	Meningkatnya kualitas Kinerja Pelayanan eksternal dan internal organisasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag	78,00	83,00	106,41	Melebihi Target
5	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	BB	B	68,00	Tidak Memenuhi Target

Dari data diatas dapat dijabarkan bahwa:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
 - a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri melalui Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Koordinasi tidak memenuhi target kinerja Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri dan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

Hal ini disebabkan oleh Penurunan ekspor Komoditas minyak nabati, arang, pulp dan kertas, serta migas dan Perlambatan ekonomi global, khususnya resiko resesi di beberapa negara mitra dagang, termasuk amerika serika (AS) dan Eropa. Dimana hal tersebut merupakan faktor utama menurunnya lapangan usaha sebagai penyerap tenaga kerja. Disamping itu, faktor lain seperti kesesuaian/kualitas SDM, sulitnya memperoleh bahan baku dan sistem pengelolaan keuangan yang kurang baik menyebabkan beberapa industri yang berhenti produksi.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah merencanakan/menganggarkan untuk:

- 1) Pelatihan-pelatihan yang diperlukan dalam menyesuaikan/meningkatkan kualitas SDM; dan
 - 2) Bantuan berupa alat untuk membantu dan melancarkan usaha IKM sesuai dengan kebutuhan.
- b. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota tidak memenuhi target Kinerja Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Hal ini disebabkan oleh pemahaman atas formula perhitungan IKU dan keterbatasan anggaran dalam melaksanakan pengawasan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah merencanakan/menganggarkan untuk:

- 1) Kegiatan sosialisasi untuk memahami formula perhitungan IKU; dan
 - 2) Mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang ada.
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi melalui Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak memenuhi target Kinerja Nilai SAKIP.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap komponen dan bobot penilaian. Selain itu, dokumen yang kurang lengkap juga menjadi kendala dalam proses penilaian.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah merencanakan/menganggarkan untuk:

- 1) Mengikuti diklat/bimbingan teknis/sosialisasi terkait SAKIP; dan
 - 2) Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penilaian SAKIP.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
- a. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting melalui Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan serta Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya telah memenuhi target Kinerja Persentase Kinerja Realisasi Pupuk.
Hal ini disebabkan oleh tercapainya target Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi.
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah merencanakan/menganggarkan untuk meningkatkan kerja sama dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi.
 - b. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan melalui Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar telah memenuhi target Kinerja Tertib Usaha.
Hal ini disebabkan oleh kepedulian dan komitmen untuk menyelesaikan rekomendasi yang sesuai dengan peruntukannya.
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah merencanakan/menganggarkan untuk mempertahankan/meningkatkan kepedulian dan komitmen dalam menyelesaikan rekomendasi yang sesuai dengan peruntukannya.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri melalui Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

Provinsi Koordinasi; Subkegiatan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat serta Subkegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri melebihi target Kinerja Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB dan Kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas.

Untuk Kinerja Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB disebabkan oleh Industri Makanan dan Minuman yang mencapai 14,35 triliun rupiah atau sebesar 48,95 persen. Berikutnya Industri Batu Bara dan Pengilangan Migas sebesar 26,30 Persen, Industri Kayu,Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari bambu, Rotan dan Sejenisnya sebesar 10,00 persen; Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman sebesar 7,48 persen; dan Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 3,63 persen.

Sedangkan untuk Kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas disebabkan oleh pertumbuhan positif Pengolahan Tembakau (60,77 persen); Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Rekaman (20,87 persen); Industri Makanan dan Minuman (9,47 persen); Industri Mesin dan Perlengkapan (8,96 persen); Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (7,03 persen); Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki (6,48 persen); Industri pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan (3,27 persen);Industri Furnitur (1,22 persen); Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari bambu, Rotan dan Sejenisnya (,20 persen); serta Industri Batubara dan Pengilangan Migas (0,33 persen).

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah merencanakan/menganggarkan untuk mempertahankan/meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk pencapaian target kinerja.

- b. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

dan Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota melebihi target kinerja Kinerja Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen, Kinerja Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku dan Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Disperindag.

Hal ini disebabkan oleh:

- 1) Komitmen untuk hadir dan melindungi hak-hak konsumen menjadi penting dalam usaha penyelesaian pengaduan konsumen;
- 2) Keberadaan UPTD BPSMB, memudahkan proses-proses pengujian sampel sehingga dapat dilihat apakah komoditi yang diuji sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak; dan
- 3) Pemahaman akan pelayanan dan kesadaran dalam melayani merupakan unsur pendukung dalam capaian indeks IKM.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah merencanakan/menganggarkan untuk mempertahankan/meningkatkan:

- 1) Komitmen untuk hadir dan melindungi hak-hak konsumen;
 - 2) Mengoptimalkan keberadaan UPTD BPSDM dalam menguji komoditi potensial; dan
 - 3) Pemahaman akan pelayanan dan kesadaran dalam melayani para pemangku kepentingan.
- c. Program Pengembangan Ekspor melalui Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi melebihi target Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan nilai ekspor batu bara, karet dan olahannya serta minyak nabati.
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah merencanakan/menganggarkan untuk mempertahankan/meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk pencapaian target kinerja.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

Dengan memperhitungkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Perubahan Target Kinerja Renstra Tahun 2024, yang mana baru 1 dari 6 indikator kinerja yang telah melebihi target renstra. Selebihnya belum memenuhi target. Rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Evaluasi
1	1. Meningkatnya Pertumbuhan Industri	1. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB	7,99	8,25	96,85	Belum Memenuhi Target
		2. Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan Non Migas	0,58	0,48	1,21	Melebihi Target
	2. Meningkatkan ekspor Non Migas	1. Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (US\$ Milyar)		1,034	-	Belum Memenuhi Target

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

	3.Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri	1	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (%)	4,55	5	91,00	Belum Memenuhi Target
2.	1.Meningkatnya kualitas pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Disperindag	76.812	81	94.829,63	Belum Memenuhi Target
		2	Nilai SAKIP	BB	BB	100,00	Memenuhi Target

Dari data diatas dapat dijabarkan bahwa:

1. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
 - a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri melalui Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Koordinasi; Subkegiatan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat serta Subkegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri melebihi target Kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas. Hal ini disebabkan oleh besarnya capaian kinerja pada tahun 2022 yakni sebesar 3,05% dan perkiraan pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 0,41%. Sehingga realisasi sampai dengan tahun 2023 diperkirakan berada pada angka 3,46%, sementara target renstra sampai dengan tahun 2026 hanya berada pada angka 1,27%. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah merencanakan/menganggarkan untuk mempertahankan/

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk pencapaian target kinerja.

- b. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota melebihi target kinerja Kinerja Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen.

Hal ini disebabkan oleh capaian kinerja pada tahun 2023 yakni sebesar 100% dan perkiraan capaian pada tahun 2024 juga sebesar 100%. Sehingga realisasi sampai dengan tahun 2024 diperkirakan tetap berada pada angka 100%, sementara target renstra sampai dengan tahun 2026 berada pada angka 97%. Namun capaian ini tidak bersifat mutlak karena bisa saja capaian kinerja ini berfluktuatif hingga tahun 2026 nanti.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah merencanakan/menganggarkan untuk terus mempertahankan/meningkatkan komitmen untuk hadir dan melindungi hak-hak konsumen.

- c. Program Pengembangan Ekspor melalui Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi melebihi target Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas. Hal ini disebabkan oleh besarnya capaian kinerja pada tahun 2022 yakni sebesar 31,79% dan perkiraan pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 6%. Sehingga realisasi sampai dengan tahun 2023 diperkirakan berada pada angka 37,79%, sementara target renstra sampai dengan tahun 2026 berada pada angka 30%.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah merencanakan/menganggarkan untuk terus mempertahankan/meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk pencapaian target kinerja.

2. Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:

Beberapa program dan kegiatan lainnya belum memenuhi 9 target kinerja yang direncanakan. Hal ini dapat dimaklumi karena pelaksanaan renstra baru

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

memasuki tahun kedua dan masih ada waktu selama 3 tahun lagi untuk dapat memenuhi target kinerja tersebut.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah merencanakan/menganggarkan program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan target-target kinerja yang direncanakan sesuai renstra.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada tabel pada halaman-halaman berikutnya.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target kinerja Program Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024	Realisasi	
									Realisasi Capaian Program/ kegiatan Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2024 (%)
2	3	4	5		6	7	8	9	10 = 7+10	11=10/9x100%
			K	Rp	K	K		K	K	K
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase penyelesaian rekomendasi perizinan, pendaftaran dan perizinan yang sesuai peruntukannya	100,00	%	5.436.780.000,00	100,00	95,00	95,00	-	-
		Persentase Tertib Usaha	62,00	%		60,00	95,00	158,33	-	-

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah pengendalian usaha perdagangan	75,00	Pelaku Usaha	848.700.000,00	13,00	6,00	46,15	-	-	-
3.30.02.1.03.02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	35,00	Dokumen	848.700.000,00	6,00	6,00	100,00	-	-	-
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA	Persentase kinerja realisasi pupuk	94,00	%	2.673.700.000,00	91,00	84,40	92,75	92,00	84,40	89,79
	BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan	5,90	%	5.728.276.070,00	5,90	5,90	100,00	5,90	5,90	100,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

	PENTING	harga barang kebutuhan pokok									
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Periode pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	72,00	Bulan	1.710.000.000,00	12,00	12,00	100,00	12,00	3,00	4,17
3.30.04.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	11,00	Laporan	780.000.000,00	11,00	11,00	100,00			-
3.30.04.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	36,00	Laporan	650.000.000,00	6,00	6,00	100,00			-

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

	dan Sub Distributor										
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Periode pengendalian harga dan informasi ketersediaan stok Bapok dan Bapokting	72,00	Bulan	4.018.276.070,00	12,00	12,00	100,00	12,00	3,00	4,17
3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	2,00	Laporan	118.276.070,00	-	-	#DIV/0!	-	-	-

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

	Barang Lintas Kabupaten/Kota	Lintas Kabupaten/Kota									
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	56,00	Laporan	3.900.000.000,00	11,00	11,00	100,00	12,00	6,00	10,71
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan	Jumlah Kabupaten Kota yang dilakukan pengawasan Pupuk Bersubsidi	11,00	Kab/Kota	2.673.700.000,00	11,00	11,00	100,00	11,00	-	-

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

	Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya										
3.30.04.1.03.01	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Laporan Pemeriksaan Kegiatan Distribusi	50,00	Laporan	1.038.000.000,00	8,00	11,00	137,50	-	-	-
3.30.04.1.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	66,00	Laporan	1.135.300.000,00	11,00	6,00	54,55	11,00	11,00	16,67
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	30,00	%	8.090.960.000,00	6,00	(19,50)	(325,00)	6,00	-	-
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Produk Ekspor Unggulan Provinsi Jambi	34,00	Produk	8.090.960.000,00	6,00	6,00	100,00	6,00	-	-

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

	yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi										
3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Kegiatan Peningkatan Produk Ekspor	10,00	Kegiatan	966.240.000,00				6,00	6,00	60,00
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	500,00	Pelaku Usaha	2.765.680.000,00	100,00	100,00	100,00		-	-
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100,00	%	5.428.324.990,00	100,00	100,00	100,00	100,00	12,50	12,50
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	51,10	%	1.539.932.155,00	41,80	88,71	212,22	46,60	50,00	97,85

		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	70,00	%	8.136.327.017,00	62,00	83,77	135,11	67,00	28,79	41,13
		Nilai IKM Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	81,00	(indeks B)		78,00	83,00	106,41	79 (indeks B)	41,50	51,23
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	11,00	Kab/Kota	5.428.324.990,00	11,00	-	-	11,00	6,00	54,55
3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	2,00	BPSK	1.939.720.000,00	3,00	3,00	100,00	-	-	-
3.30.06.1.01.02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	10,00	LPKSM	597.200.000,00	-	-	#DIV/0!	-	-	-

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

3.30.06. 1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	260,00	Pengaduan	2.891.404.990,00	40,00	11,00	27,50	20,00	6,00	2,31
3.30.06. 1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian mutu produk	15.654,00	Parameter	8.136.327.017,00	2.515,00	604,00	24,02	2.641,00	45,00	0,29
		Jumlah PAD jasa Pelayanan Laboratorium	1.537.507.337,00			180.000.000,00	195.967.500	108,87	200.000.000,00	178.794.000	11,63
		Periode Penerapan Dokumen Sistem Mutu Laboratorium Terakreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017	72,00	Bulan		12,00	12,00	100,00	12,00	6,00	8,33
		Periode Layanan Pengujian dan Kalibrasi di UPTD BPSMB	72,00	Bulan		12,00	12,00	100,00	12,00	6,00	8,33
3.30.06. 1.02.01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	352,00	Komoditi	922.299.557,00	55,00	110,00	200,00			-
3.30.06. 1.02.06	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah Produk Potensial yang dipantau	150,00	Produk					50,00	41,00	27,33

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	15.654,00	Dokumen	4.251.111.348,00	2.515,00	604,00	24,02	2.515,00	130,00	0,83
3.30.06.1.02.03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	16,00	Sertifikat	1.007.043.052,00	2,00	-	-		-	-
3.30.06.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	99,00	Sertifikat	1.955.873.060,00	487,00	525,00	107,80	600,00	130,00	131,31
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten Kota yang dilakukan pengawasan barang beredar/atau jasa	11,00	Kab/Kota	1.539.932.155,00	11,00	-	-	11,00	8,00	72,73
3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	jumlah barang beredar yang diawasi	54,00	Laporan	1.539.932.155,00	9,00	24,00	266,67	9,00	9,00	16,67

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pasar Modern yang memasarkan produk dalam negeri	65,00	%	6.560.102.169,00	50,00	100,00	200,00	50,00	12,50	19,23
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi penggunaan produk dalam Negeri	20,00	Kali	5.674.383.819,00	5,00	4,00	80,00	5,00	1,00	5,00
3.30.07.1.01.01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	36,00	UMKM	5.674.383.819,00	6,00	4,00	66,67	6,00	2,00	5,56
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Mou Kemitraan UKM	60,00	Dokumen	518.933.500,00	-	-	-	-	-	-

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

3.30.07. 1.02.01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	59,00	UMKM	518.933.500,00						-
3.30.07. 1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Informasi Perdagangan	11,00	Kab/Kota	366.784.850,00	11,00	1,00	9,09	11,00	-	-
3.30.07. 1.03.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	10,00	Dokumen	366.784.850,00	2,00	1,00	50,00		-	-
3.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan jumlah industri besar di Provinsi	1,00	persen	24.590.000.000,00	1,00	1,00	100,00	1,00	0,17	17,00
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	0,48	persen		0,41	4,44	1.082,93	0,45	3,58	745,83

		Pengolahan Nonmigas									
		Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	8,30	perse n		7,97	10,22	128,23	8,19	4,965	59,82
		Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas	1.034	US\$ Milyar		0,98	0,75	76,17	1,017	0,29	0,03
		Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (PMA dan PMDN)	0,93	Triliun		0,63	0,78	123,99	0,63	0,78	84,27
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembanguna n industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	84,00	perse n		81,00	81,89	101,10	81,00	40,50	48,21
		Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri	278.533	orang		257.866,00	85.794,00	33,27	271.644	146.440,00	52,58

		Pengolahan (orang)									
3.31.02. 1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	84,00	%	24.590.000 .000,00	81,00	81,89	101,10	81,00	-	-
		Persentase pertambahan jumlah industri besar di Provinsi	5,00	%		1,00	1,00	100,00	1,00	0,17	3,40
3.31.02. 1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	50,00	Doku men	1.800.000. 000,00		-			-	-
3.31.02. 1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	110,0 0	Doku men	3.730.000. 000,00	3,00	3,00	100,00	3,00	-	-

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

	Pembangunan Sumber Daya Industri	Pembangunan Sumber Daya Industri									
3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	28,00	Dokumen	9.650.000.000,00	6,00	6,00	100,00	6,00	-	-
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	75,00	Dokumen	7.625.000.000,00	5,00	5,00	100,00	5,00	-	-
3.31.02.1.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	66,00	Dokumen	1.235.000.000,00	11,00	11,00	100,00		-	-
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin sesuai kewenangan yang dikendalikan	20,00	%	1.633.102.100,00	20,00	20,00	100,00	20,00	7,00	35,00

3.31.03. 1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	20,00	%	1.633.102. 100,00	100,00	20,00	20,00	100,00	1,00	5,00
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	%		100,00	100,00	100,00	100,00	N/A	#VALUE!
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	%		100,00	100,00	100,00	100,00	N/A	#VALUE!

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

3.31.03. 1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	160,00	Perusahaan	1.633.102.100,00	30,00	17,00	56,67	30,00	11,00	6,88
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	25,00	%	4.286.757.000,00	10,00	50,00		10,00	3,75	15,00
3.31.04. 1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI,	Jumlah Data dan Informasi Industri Berbasis SIINas	6.690,00	Unit	4.286.757.000,00	1.115,00	804,00	72,11	1.115,00	1.536,00	22,96

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

	dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Periode penyampaian infomasi Industri Kewenangan Provinsi	72,00	Bulan		12,00	12,00	100,00	12,00	6,00	8,33
3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	6,00	Doku men	1.857.438.000,00	1,00	1,00	100,00	1,00	-	-
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP	A		122.231.108.196,00	BB	BB	BB	BB	B	73,81
		Predikat AKIP Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah			Predikat AKIP Perangkat Daerah		#VALUE!	Predikat AKIP Perangkat Daerah		-

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	42,00	Dokumen	2.530.451.025,00	7,00	4,00	57,14	7,00	4,00	9,52
3.31.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	36,00	Dokumen	1.960.451.075,00	6,00	6,00	100,00	7,00	4,00	11,11
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			-			-	#DIV/0!
3.31.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,00	Laporan	569.999.950,00	1,00	1,00	100,00		-	-
3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode penyediaan Administrasi Keuangan	72,00	Bulan	96.723.616.600,00	12,00	9,00	75,00	12,00	6,00	8,33
3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84,00	Orang / Bulan	95.222.691.272,00	14,00	14,00	100,00	14,00	6,00	7,14

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

3.31.01. 1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72,00	Dokumen	1.158.653.154,00	12,00	12,00	100,00	12,00	6,00	8,33
3.31.01. 1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30,00	Dokumen	342.272.175,00	4,00	4,00	100,00			-
3.31.01. 1.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	18,00	Dokumen	204.366.550,00	-	-		-	-	-
3.31.01. 1.03.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18,00	Unit	204.366.550,00	-	-		-	-	-

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jambi	1.013,00	Orang	1.733.938.100,00	175,00	162,00	92,57	185,00	93,00	9,18
3.31.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5,00	Paket	616.500.000,00	1,00	1,00	100,00		-	-
3.31.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	30,00	Dokumen	345.842.000,00	5,00	5,00	100,00			-
3.31.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	180,00	Orang /Kali	771.596.100,00	30,00	6,00	20,00		-	-
3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72,00	Bulan	6.583.765.124,00	12,00	9,00	75,00	12,00	3,00	4,17
3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	115,00	Paket	424.428.170,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	0,87

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

	Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan									
3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72,00	Paket	872.958.862,00	12,00	12,00	100,00	12,00	-	-
3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30,00	Paket	382.508.050,00	5,00	5,00	100,00	5,00	1,00	3,33
3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	360,00	Dokumen	91.676.442,00	60,00	60,00	100,00	60,00	15,00	4,17
3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.008,00	Laporan	3.812.193.600,00	12,00	12,00	100,00	12,00	3,00	0,30
3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72,00	Bulan	6.104.997.156,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	16,67

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

3.31.01. 1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.00 0,00	Lapora n	557.151.00 0,00	12,00	12,00	100,00	12,00	-	-
3.31.01. 1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72,00	Lapora n	2.395.089. 200,00	12,00	12,00	100,00	12,00	3,00	4,17
3.31.01. 1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72,00	Lapora n	3.152.756. 956,00	12,00	12,00	100,00	12,00	-	-
3.31.01. 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	72,00	Bulan	5.449.237. 907,00	12,00	12,00	100,00	12,00	9,00	12,50
3.31.01. 1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	125,0 0	Unit	1.740.937. 800,00	30,00	30,00	100,00	30,00	-	-

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

3.31.01. 1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional roda 4 dan roda 2	25,00	Unit	348.187.55 0,00				5,00		-
3.31.01. 1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	185,0 0	Unit	602.779.22 4,00	20,00	20,00	100,00	20,00	-	-

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa Indikator Kinerja Kunci Urusan Pedagangan Provinsi dan Urusan Perindustrian Provinsi yang dijalankan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Beberapa indicator tersebut, disajikan pada table berikut ini.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

NO	Indikator Kinerja Kunci	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Urusan Perdagangan										
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	6,00	6,00	6,00	6,00	31,79	6,00	6,00	6,00	Sesuai Rencana
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	93,00	93,00	95,00	97,00	100,00	93,00	95,00	97,00	Sesuai Rencana
3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	62,00	62,00	66,00	67,00	98,28	62,00	66,00	67,00	Sesuai Rencana
4	Tertib Usaha	60,00	60,00	60,00	62,00	60,00	60,00	60,00	62,00	Sesuai Rencana
5	Persentase kinerja realisasi pupuk	91,00	91,00	92,00	92,00	91,00	91,00	92,00	92,00	Sesuai Rencana
6	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	41,80	41,80	43,25	46,60	40,00	41,80	43,25	46,60	Sesuai Rencana
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5,90	5,90	5,90	5,90	2,81	5,90	5,90	5,90	Sesuai Rencana
Urusan Perindustrian										
1	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Sesuai Rencana
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	80,00	81,00	82,00	83,00	64,30	81,00	82,00	83,00	Sesuai Rencana
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Sesuai Rencana
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A	100,00	100,00	100,00	Pada Tahun 2022 Tidak Ada IPUI

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja Kunci	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A	100,00	100,00	100,00	Pada Tahun 2022 Tidak Ada IPKI
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	5,00	10,00	15,00	20,00	5,00	10,00	15,00	20,00	Sesuai Rencana

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Tahun 2022, tidak terdapat IPUI dan IPKI. Selain itu, hanya kinerja Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan dan Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP yang belum mencapai target. Untuk Tahun 2025 dan tahun-tahun lainnya, kinerja diharapkan sesuai dengan rencana.

2.3.2 Koordinasi dan Sinergi Program antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta Dengan Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Pembangunan

Untuk Koordinasi dan Sinergi Program antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta Dengan Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Pembangunan telah dilakukan melalui Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun Anggaran 2024. Rakortekrenbang dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 28 Februari 2024. Sedangkan, Rakortekrenbang dengan Pemerintah Pusat telah dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 4 s/d 7 Maret 2024 dengan hasil sebagaimana terdapat dalam table berikut.

**Hasil Pembahasan Desk Urusan Pemerintahan
Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2025
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi**

No	Indikator Kinerja Urusan	Target Renstra	Hasil Rakortek-renbang	Catatan
Urusan Perdagangan				
1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	6,0	6,0	Tetap (dibawah target nasional 7,86%)
2	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	46,60	55,00	Naik (mengikuti target nasional 55%)
3	Persentase penanganan pengaduan konsumen	92,00	92,00	Tetap (sama dengan target nasional 92%)
4	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	66,00	75,00	Naik (mengikuti target nasional 75%)
5	Tertib Usaha	60,00	90,00	Naik (mengikuti target nasional 90%)
6	Persentase kinerja realisasi pupuk	92,00	90,00	Turun (mengikuti target nasional 90%)
7	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	5,90	5,90	Tetap (sama dengan target nasional 5,9%)
8	Inflasi Pangan Bergejolak	5,00	5,00	Tetap (sama dengan target nasional 5%)
9	Pertumbuhan implementasi PLK (Pasar Lelang Komoditas)	48,00	50,00	Naik (mengikuti target nasional 50%)
Urusan Perindustrian				
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	0,43	0,43	Tetap (dibawah target nasional 6,62%)
2	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	8,08	8,08	Tetap (dibawah target nasional 18,9%)
3	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	0,93	1,00	Naik (target nasional 181,59 USD Miliar)
4	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Orang)	264.755	83.683	Turun (target nasional 21,95 juta orang)
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	0,727	2,7	Naik (target nasional 613,85 USD Miliar)

2.3.3 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah disajikan berdasarkan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB, Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas, Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan dan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas

a. Permasalahan

Keterbatasan infrastruktur perhubungan yang mendukung lancarnya aktivitas rantai pasok industri dan keterbatasan industri manufaktur berbasis bahan baku komoditas yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya lahan, khususnya perkebunan merupakan permasalahan utama selain belum terwujudnya Kawasan Industri Kemingking.

b. Hambatan

Iklim investasi yang masih berdasarkan *demand base*, belum *supply base* dan ketidakcocokan Rencana Tata Ruang Wilayah dan ketersediaan prasarana pendukung menghambat berkembangnya industri manufaktur dan menghambat terwujudnya Kawasan Industri Kemingking.

2. Persentase penanganan pengaduan konsumen

a. Permasalahan

Belum terjangkaunya masyarakat secara masif dalam perlindungan konsumen, terutama terkait pemahaman masyarakat tentang perlindungan konsumen dan proses penyelesaian sengketa konsumen.

b. Hambatan

Keberpihakan alokasi anggaran dan ketersediaan sumber daya yang belum memadai untuk melakukan sosialisasi perlindungan konsumen secara massif, termasuk proses mediasi.

3. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

a. Permasalahan

Banyaknya barang yang harus diawasi dan luasnya lingkup pengawasan, terutama untuk barang ber-SNI wajib.

b. Hambatan

Ketersediaan anggaran dan SDM selama ini hanya memungkinkan untuk melakukan pengawasan berdasarkan sampling.

4. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag

a. Permasalahan

Keterbatasan ruang lingkup pengujian dan kalibrasi serta tidak adanya kewajiban dari pelaku usaha untuk melakukan pengujian dan kalibrasi di UPTD BPSMB.

b. Hambatan

Keberpihakan alokasi anggaran dan ketersediaan sumber daya yang belum memadai untuk menambah ruang lingkup pengujian dan kalibrasi.

5. Persentase kinerja realisasi pupuk

a. Permasalahan

Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait serta kepatuhan pelaku usaha dalam aspek legalitas dan ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi.

b. Hambatan

Ketersediaan anggaran selama ini hanya memungkinkan untuk melakukan pengawasan berdasarkan sampling, mengingat banyaknya pelaku usaha dalam jejang penyaluran pupuk subsidi.

6. Tertib Usaha

a. Permasalahan

Kurang memadainya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan dan prosedur perizinan.

b. Hambatan

Ketersediaan anggaran selama ini hanya memungkinkan untuk melakukan pengawasan berdasarkan sampling, mengingat banyaknya pelaku usaha yang seharusnya diawasi dan dilayani.

7. Pertumbuhan nilai ekspor non migas

a. Permasalahan

Pada periode 2018 sampai dengan 2022, ekspor asal Provinsi Jambi masih didominasi oleh ekspor komoditi migas dan pertambangan, meskipun pada tahun 2022 ekspor komoditi non migas mulai menempati porsi yang lebih besar dari komoditi migas yaitu sebesar 51,68 persen dari total ekspor. Selain itu, ekspor asal Provinsi Jambi lebih banyak yang melalui pelabuhan di luar Provinsi Jambi yang pada tahun 2022 persentasenya sebesar 57,14%.

b. Hambatan

Belum adanya pelabuhan internasional dan keterbatasan infrastruktur perhubungan yang mendukung lancarnya aktivitas lalu lintas ekspor di Provinsi Jambi.

8. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok

a. Permasalahan

Jumlah ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok yang kurang stabil.

b. Hambatan

Ketersediaan jumlah dan jenis bahan kebutuhan pokok yang belum bisa dipenuhi sepenuhnya dari dalam Provinsi Jambi.

9. Nilai SAKIP

a. Permasalahan

Nilai SAKIP belum sesuai dengan target dengan Predikat BB.

b. Hambatan

kurangnya pemahaman terhadap komponen dan bobot penilaian. Selain itu, dokumen yang kurang lengkap juga menjadi kendala dalam proses penilaian.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah disajikan berdasarkan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB, Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas, Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan dan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas

a. Tantangan

Meningkatkan Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB, Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas, Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan dan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas.

b. Peluang

Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB dan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas sejauh ini telah mencapai target. Sementara Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas, meskipun belum mencapai target tetapi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan yang masih jauh dari target. Namun hal ini sudah dikomunikasikan, dikoordinasikan dan diusulkan penyesuaian target melalui perubahan RPJMD yang akan disusul dengan Perubahan Renstra dan Renja.

2. Persentase penanganan pengaduan konsumen

a. Tantangan

Mempertahankan capaian kinerja persentase penanganan pengaduan konsumen.

b. Peluang

Dengan dibantu oleh 3 BPSK yang ada, diharapkan kinerja persentase penanganan pengaduan konsumen dapat dipertahankan.

3. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

a. Tantangan

Meningkatkan kinerja Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memperbanyak jumlah barang ber SNI Wajib yang diawasi.

b. Peluang

Memperbanyak pengawasan di dalam Kota Jambi yang membutuhkan lebih sedikit anggaran daripada memperbanyak pengawasan di Kabupaten/Kota lain yang membutuhkan anggaran lebih besar.

4. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag

a. Tantangan

Mempertahakan/meningkatkan capaian kinerja Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag.

b. Peluang

Disperindag mempunyai UPTD BPSDM yang fokus terhadap pencapaian kinerja ini. Proses pembelajaran dan perbaikan-perbaikan terus dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja ini.

5. Persentase kinerja realisasi pupuk

a. Tantangan

Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait serta pengawasan kepatuhan pelaku usaha dalam aspek legalitas dan ketepatan penyaluran/penggunaan pupuk bersubsidi, terutama di level pengecer dan kelompok tani. Karena ada beberapa pemberitaan/informasi tentang penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

b. Peluang

Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota karena Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Persentase kinerja realisasi pupuk

juga menjadi Indikator Kunci Keluaran *Outcome* Urusan Perdagangan Kabupaten/Kota.

6. Tertib Usaha

a. Tantangan

Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan dan prosedur perizinan.

b. Peluang

Provinsi Jambi tidak memiliki Toko Bebas Bea Minuman Beralkohol (TBB MB) dan permohonan penerbitan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor dan Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) Pengecer Terdaftar pun terbilang jarang. Sehingga yang harus ditingkatkan adalah Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi, Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA), mengingat Provinsi Jambi adalah salah satu Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA.

7. Pertumbuhan nilai ekspor non migas

a. Tantangan

Mempertahankan/meningkatkan pertumbuhan nilai ekspor non migas.

b. Peluang

Pada dasarnya kinerja pertumbuhan nilai ekspor non migas telah mencapai target jika dibandingkan dengan target Renstra Disperindag. Apalagi pada tahun 2024 ekspor komoditi non migas mulai menempati porsi yang lebih besar dari komoditi migas yaitu sebesar 51,68 persen dari total ekspor. Jika hal ini dapat dipertahankan/ditingkatkan, maka kinerja ini

8. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok

a. Tantangan

Menjaga jumlah ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok agar tetap stabil.

b. Peluang

Meskipun jumlah ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok cenderung fluktuatif, namun selama ini Provinsi Jambi masih mampu menjaga stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok.

9. Nilai SAKIP

a. Tantangan

Meningkatkan Nilai SAKIP sesuai dengan target dengan Predikat BB.

b. Peluang

Mempelajari komponen dan bobot penilaian. Selain itu, mendata dan menyiapkan dokumen secara lengkap dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan nilai SAKIP.

2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024

Formulasi isu-isu penting dalam perumusan Program dan Kegiatan Prioritas 2024 mengacu kepada indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB, Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas, Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan dan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah bagaimana meningkatkan Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB, Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas, Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan dan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas. Peningkatan ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

- 1) Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

b. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

- 1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

c. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

- 1) Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

2. Persentase penanganan pengaduan konsumen

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah mempertahankan capaian kinerja persentase penanganan pengaduan konsumen. Kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- 1) Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

3. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah meningkatkan kinerja Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memperbanyak jumlah barang ber SNI Wajib yang diawasi. Kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- 1) Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

4. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag. Kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- 1) Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

5. Persentase kinerja realisasi pupuk

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait serta pengawasan kepatuhan pelaku usaha dalam aspek legalitas dan ketepatan penyaluran/penggunaan pupuk bersubsidi, terutama di level pengecer dan kelompok tani. Kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING

- 1) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

6. Tertib Usaha

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan dan prosedur perizinan. Kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

- 1) Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor
- 2) Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi
- 3) Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer
- 4) Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

7. Pertumbuhan nilai ekspor non migas

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah mempertahankan/meningkatkan pertumbuhan nilai ekspor non migas. Kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

- 1) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi

b. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

- 1) Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
- 2) Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
- 3) Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

8. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah menjaga jumlah ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok agar tetap stabil. Kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING

- 1) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
- 2) Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

9. Nilai SAKIP

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah meningkatkan Nilai SAKIP sesuai dengan target dengan Predikat BB.. Kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk menyesuaikan rencana kerja. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan disajikan pada table berikut ini:

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2025		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025 (BERDASARKAN RENSTRA)		CATATAN PENTING
				TARGET 2025	RENCANA PENDANAAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			32.731.936.232,00		35.941.868.618,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			32.731.936.232,00		35.941.868.618,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			26.901.936.232,00		29.237.368.618,00	
1	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	-	18.700.761.525,00	-	19.806.017.704,00	Disesuaikan dengan Kebutuhan
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	544.779.532,00	-	633.246.462,00	
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
			Jumlah Dokumen	6 Doku	354.779.532,00		407.996.462,00	

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			Perencanaan Perangkat Daerah	men				
3.30.01.1.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	35.000.000,00		40.250.000,00	
3.30.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	30.000.000,00		35.000.000,00	
3.30.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44 Laporan	125.000.000,00		150.000.000,00	
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	13.835.162.325,00	-	14.221.752.883,00	
3.30.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang / Bulan	13.509.470.325,00		13.847.207.083,00	
3.30.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	280.692.000,00		322.795.800,00	
3.30.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	45.000.000,00		51.750.000,00	
3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	40.000.000,00	-	46.000.000,00	

Disesuaikan dengan Kebutuhan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

3.30.01.1.03.00.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	33 Laporan	40.000.000,00		46.000.000,00
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	315.812.500,00	-	363.184.375,00
3.30.01.1.05.00.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	130.812.500,00		150.434.375,00
3.30.01.1.05.00.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	5 Dokumen	35.000.000,00		40.250.000,00
3.30.01.1.05.00.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	30 Orang	150.000.000,00		172.500.000,00
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	761.711.863,00	-	858.044.384,00
3.30.01.1.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	30.000.000,00		34.500.000,00
3.30.01.1.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	47.464.803,00		47.464.803,00
3.30.01.1.06.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	5 Paket	72.030.250,00		72.030.250,00
3.30.01.1.06.00.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang</i>	1 Dokumen	8.313.810,00		9.560.881,00

Disesuaikan dengan Kebutuhan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			<i>Disediakan</i>				
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	403.903.000,00		464.488.450,00
3.30.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	12 Dokumen	200.000.000,00		230.000.000,00
3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-		-	1.405.000.000,00	-	1.615.750.000,00
	Urusan Pemerintah Daerah						
3.30.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	30 Unit	500.000.000,00		575.000.000,00
3.30.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1 Unit	550.000.000,00		632.500.000,00
3.30.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	2 Paket	5.000.000,00		5.750.000,00
3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit	100.000.000,00		115.000.000,00
3.30.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	250.000.000,00		287.500.000,00
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang	-		-	743.064.849,00	-	854.524.576,00
	Urusan Pemerintahan Daerah						
3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan</i>	1 Laporan	70.000.000,00		80.500.000,00

Disesuaikan dengan Kebutuhan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			Jasa Surat Menyurat	an				
	3.30.01.1.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	538.064.849,00		618.774.576,00	
	3.30.01.1.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	135.000.000,00		155.250.000,00	
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.055.230.456,00	-	1.213.515.024,00	
	3.30.01.1.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit	235.865.000,00		271.244.750,00	
	3.30.01.1.09.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	20.355.000,00		23.408.250,00	
	3.30.01.1.09.00.05	Pemeliharaan Mebel						
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	25.000.000,00		28.750.000,00	
	3.30.01.1.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	74.010.456,00		85.112.024,00	
	3.30.01.1.09.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	450.000.000,00		517.500.000,00	
	3.30.01.1.09.00.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000,00		287.500.000,00	
2	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN	-	-	780.000.000,00	-	897.000.000,00	

Disesuaikan dengan Kebutuhan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

		PERUSAHAAN						
	3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	-	-	170.000.000,00	-	195.500.000,00	
	3.30.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						
			<i>Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	3 Dokumen	170.000.000,00		195.500.000,00	
	3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	-	-	240.000.000,00	-	276.000.000,00	
	3.30.02.1.02.0001	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	5 Dokumen	120.000.000,00		138.000.000,00	
	3.30.02.1.02.0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						
			<i>Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission</i>	4 Dokumen	120.000.000,00		138.000.000,00	
	3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	-	-	220.000.000,00	-	253.000.000,00	

Target Kinerja Disesuaikan dengan Hasil Rakortek krenban g

Disesuaikan dengan Kebutuhan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

	3.30.02.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					
			<i>Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission</i>	4 Dokumen	120.000.000,00		138.000.000,00
	3.30.02.1.03.0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya					
			<i>Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission</i>	1 Dokumen	100.000.000,00		115.000.000,00
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	-	-	150.000.000,00	-	172.500.000,00
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA					
			<i>Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal</i>	20 Dokumen	150.000.000,00		172.500.000,00
3	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	150.000.000,00	-	172.500.000,00
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	-	-	150.000.000,00	-	172.500.000,00
	3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas					
			<i>Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi</i>	30 Orang	150.000.000,00		172.500.000,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

4	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	3.631.038.000,00	-	4.175.693.700,00	
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	-	-	200.000.000,00	-	230.000.000,00	
	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor						
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i>	11 Laporan	120.000.000,00		138.000.000,00	
	3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor						
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i>	66 laporan	80.000.000,00		92.000.000,00	
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	-	2.932.500.000,00	-	3.372.375.000,00	
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	11 Laporan	2.932.500.000,00		3.372.375.000,00	

Target Persentase Kinerja Realisasi Pupuk disesuaikan dengan hasil Rakorte krenban g

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	-	-	498.538.000,00	-	573.318.700,00	
	3.30.04.1.03.00.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi						
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi</i>	4 Laporan	150.000.000,00		172.500.000,00	
	3.30.04.1.03.00.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi						
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%</i>	11 Laporan	82.938.000,00		95.378.700,00	
	3.30.04.1.03.00.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida						
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida</i>	8 Laporan	175.600.000,00		201.940.000,00	
	3.30.04.1.03.00.05	Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi						
			<i>Jumlah laporan pemeriksaan persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi</i>	4 Laporan	90.000.000,00		103.500.000,00	
5	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-	744.948.000,00	-	856.690.200,00	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang	-	-	744.948.000,00	-	856.690.200,00	Disesuaikan dengan Kebutuhan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

		bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi						
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional						
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i>	6 Pelaku Usaha	200.000.000,00		230.000.000,00	
	3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal						
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal</i>	100 Pelaku Usaha	150.000.000,00		172.500.000,00	
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan						
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan</i>	150 Pelaku Usaha	200.000.000,00		230.000.000,00	
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor						
			<i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi</i>	20 Produk	194.948.000,00		224.190.200,00	
6	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	2.642.406.207,00	-	3.038.767.139,00	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-	892.398.000,00	-	1.026.257.700,00	Target Kinerja Disesuaikan dengan Renstra dan Hasil Rakorte krenban g
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen						

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			<i>Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif</i>	1 BPSK	350.000. 000,00		402.500.0 00,00	
	3.30.06. 1.01.00 02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen						
			<i>Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif</i>	2 LPKS M	155.000. 000,00		178.250.0 00,00	
	3.30.06. 1.01.00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen						
			<i>Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani</i>	40 Peng aduan	387.398. 000,00		445.507.7 00,00	
	3.30.06. 1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.533.37 0.207,00	-	1.763.375. 739,00	
	3.30.06. 1.02.00 04	Pengembangan Layanan Kalibrasi						
			<i>Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan</i>	500 Sertifi kat	421.560. 804,00		484.794.9 25,00	
	3.30.06. 1.02.00 05	Pengembangan Layanan Pengujian						
			<i>Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan</i>	501 lapora n	759.940. 331,00		873.931.3 81,00	
	3.30.06. 1.02.00 06	Pemantauan Mutu Produk						
			<i>Jumlah produk potensial yang dipantau</i>	50 Produ k	161.869. 072,00		186.149.4 33,00	Disesua ikan dengan Kebutu han

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

	3.30.06.1.02.00.07	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi					
			<i>Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan</i>	2 Sertifikat	190.000.000,00		218.500.000,00
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-	216.638.000,00	-	249.133.700,00
	3.30.06.1.03.00.03	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi</i>	9 Laporan	216.638.000,00		249.133.700,00
7	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-	252.782.500,00	-	290.699.875,00
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	-	-	162.782.500,00	-	187.199.875,00
	3.30.07.1.01.00.02	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi					
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri</i>	6 UMKM	162.782.500,00		187.199.875,00
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	25.000.000,00	-	28.750.000,00
	3.30.07.1.02.00.02	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi					
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi</i>	50 UMK	25.000.000,00		28.750.000,00

Target Kinerja Disesuaikan dengan Renstra

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			<i>pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i>	M				
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	65.000.000,00	-	74.750.000,00	
	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi						
			<i>Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer</i>	1 Laporan	65.000.000,00		74.750.000,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			5.830.000.000,00		6.704.500.000,00	
1	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	5.150.000.000,00	-	5.922.500.000,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	-	-	5.150.000.000,00	-	5.922.500.000,00	
	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi						
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri</i>	1 Dokumen	150.000.000,00		172.500.000,00	
	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan</i>	1 Dokumen	200.000.000,00		230.000.000,00	

Target Kinerja Disesuaikan dengan Renstra dan Hasil Rakorte krenban g

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			Perwilayahan Industri					
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	1 Dokumen	950.000.000,00		1.092.500.000,00	
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>	1 Dokumen	500.000.000,00		575.000.000,00	
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	1 Dokumen	3.200.000.000,00		3.680.000.000,00	
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri						
			<i>Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>	1 Dokumen	150.000.000,00		172.500.000,00	
2	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-	200.000.000,00	-	230.000.000,00	
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	-	-	200.000.000,00	-	230.000.000,00	
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi						
			<i>Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas</i>	1 Dokumen	200.000.000,00		230.000.000,00	

Disesuaikan dengan Kebutuhan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			<i>Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</i>					
3	3.31.04	PROGRAM PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	480.000.000,00	-	552.000.000,00	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-	480.000.000,00	-	552.000.000,00	
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						Target Kinerja Disesuaikan dengan Renstra
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	1 Dokumen	480.000.000,00		552.000.000,00	
	J U M L A H				32.731.936.232,00		35.941.868.618,00	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh dari Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Lintas OPD dan Musyawarah Rencana Pembangunan. Untuk urusan perdagangan dan perindustrian, usulan ini terutama ditampung melalui Forum OPD yang melibatkan perwakilan tiap-tiap Kabupaten/kota yang menangani urusan perdagangan dan perindustrian. Usulan-usulan ini kemudian disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan-usulan dimaksud seperti:

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Kerinci	Periode pengendalian harga dan informasi	1 Kali Operasi	

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

	(Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan)		ketersediaan stok Bapok dan Bapokting	Pasar	
2	Program Pengembangan Ekspor (Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi)	Kerinci	Jumlah Produk Ekspor Unggulan Provinsi Jambi	1 Pembinaan/ Pelatihan Citra Produk Ekspor	
3	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen (Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota)	Tebo	Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	1 Kegiatan Pengawasan	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri (Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi)	- Kerinci - Sarolangun - Muaro Jambi - Tanjung Jabung Barat - Bungo - Tanjung Jabung Timur	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	- 8 Pelatihan IKM - 20 Sertifikat Halal - 4 Paket Bantuan Alat IKM	
5	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (Kegiatan Penyediaan	- Muaro Jambi - Tanjung Jabung	Jumlah Data dan Informasi Industri	1 Bimtek SIINas	

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

	Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas))	Timur	Berbasis SIINas Periode penyampaian infomasi Industri Kewenangan Provinsi		
--	--	-------	--	--	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tema Pembangunan Nasional yang direncanakan akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Adapun arah kebijakan RKP Tahun 2025 ada 6 dengan rincian:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
2. Penguatan karakter dan jati diri bangsa
3. Peningkatan infrastruktur konektivitas
4. Pengembangan transisi energi
5. Percepatan infrastruktur IKN
6. Reformasi pengelolaan sampah

Sedangkan prioritas pembangunan diarahkan untuk:

1. SD berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa.
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah.
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

3.1.1 Kementerian Perdagangan

Arah kebijakan Kementerian Perdagangan tahun 2025 ditujukan untuk memperkuat agenda pembangunan dan RPJMN 2025-2029. Kementerian perdagangan berupaya mendukung Prioritas Nasional (PN) yaitu pada:

1. PN 01, pengembangan ekspor;
2. PN 02, pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
3. PN 03, perdagangan antarwilayah
4. PN 04, serta pengamanan perdagangan.

3.1.2 Kementerian Perindustrian

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian pada Tahun 2025 difokuskan pada upaya untuk mengatasi isu utama pembangunan industri melalui:

1. Restrukturisasi mesin/peralatan industri;
2. Hilirisasi Sumber Daya Alam;
3. Partisipasi dalam Hannover Messe 2024;
4. Pameran vokasi industri dan Job Fair tingkat nasional;
5. Pembangunan industri hijau ;
6. Pengembangan IKM startup berbasis teknologi;
7. Fasilitasi sertifikasi TKDN;
8. Fasilitasi dan Pembinaan Industri Halal;
9. Pembangunan Indonesia Manufacturing Center (IMC)
10. Penerapan 4.0 di Industri

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di pada satu tahun mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi.

A. TUJUAN

Adapun tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

dan permasalahan-permasalahan bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi. Berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan-permasalahan bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi maka ditetapkan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah;
2. Meningkatkan peran sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah;
3. Meningkatkan perdagangan luar negeri;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas

B. SASARAN

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas, maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Adapun sasaran pembangunan sektor industri dan perdagangan yang ingin diwujudkan sebagaimana yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Untuk mewujudkan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka disusunlah sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah, ditetapkan sasaran berupa tumbuh dan berkembangnya sektor industri dengan indikator sasaran adalah :
 - a. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB (%)
 - b. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)
 - c. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan (orang)
2. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan peran sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah, ditetapkan sasaran berupa

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri dengan indikator sasaran adalah :

- a. Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)
 - b. Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)
 - c. Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)
 - d. Persentase kinerja realisasi pupuk (%)
 - e. Tertib Usaha (%)
3. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan perdagangan luar negeri, ditetapkan sasaran berupa meningkatnya nilai ekspor dengan indikator sasaran adalah :
- a. Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (USD Miliar)
 - b. Pertumbuhan nilai ekspor non migas (%)
4. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha, ditetapkan sasaran berupa meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal dengan indikator sasaran adalah :
- a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
5. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas, ditetapkan sasaran berupa terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator sasaran adalah :
- a. Nilai SAKIP

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi melalui program/kegiatannya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut ini.

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2025

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke -
						2025
1	Meningkatnya Peran Industri dan Perdagangan Dalam Stabilitas Perekonomian Provinsi Jambi	1. Meningkatkan Pertumbuhan Industri	1	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB	7.65	8,19
			2	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan Non Migas	0,35	0.45
		2.Meningkatnya ekspor Non Migas	1	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (US\$ Milyar)	0,934	1,017
		3.Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri	1	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (%)		4,80
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1.Meningkatnya kualitas pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Disperindag	76.812	80

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke -
						2025
			2	Nilai SAKIP	B	BB

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

3.3.1 Faktor yang Menjadi Bahan Petimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Provinsi Jambi untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program gubernur, RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. RPJMD Provinsi Jambi disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021 – 2026.

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis baik SKPD Provinsi maupun Kabupaten Kota, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Gubernur Jambi yang tertuang dalam RPJMD tersebut. Adapun Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026 yaitu :

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jambi dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan Memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka maksud dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

Jambi Maju : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Jambi Aman : tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam,

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Jambi Nyaman: Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Jambi Tertib : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Jambi Amanah: Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

Jambi Profesional: Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 3 (tiga) misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut

Misi satu : Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

- Misi dua : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
- Misi tiga : Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, menempatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terutama untuk mendukung Misi 2 (dua) yaitu ***“Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”***

Dalam upaya mewujudkan Misi ke-2 (dua) tersebut, dengan Pagu Indikatif sebesar Rp 19.854.938.429,00 maka ada 8 program dan 15 Kegiatan urusan pilihan perindustrian dan perdagangan yang akan dilakukan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Urusan Pilihan Perdagangan**, melalui program dan Kegiatan:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 - 1) Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan; dan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

- 2) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya.
 - c. Program Pengembangan Ekspor;
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
 - d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
 - 1) Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
 - e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
 - 1) Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
- 2. Urusan Pilihan Perindustrian, melalui program dan Kegiatan:**
- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
 - 1) Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
 - b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
 - 1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
 - c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 1) Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

3.3.3 Perbandingan Rumusan Program dan Kegiatan dengan Rancangan Awal

Terdapat perbedaan yang signifikan antara Rencana Pendanaan pada Rancangan Awal Renja yang berjumlah Rp22.582.772.674,00 dengan dengan Pagu Indikatif pada Rancangan Akhir Renja yang berjumlah Rp34.202.375.195,00. Rincian perbedaannya dapat dilihat pada table berikut:

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	15	16
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			24.548.952.000,0 0		35.941.868.618,0 0
	3	URUSAN PEMERINTAHAN			24.548.952.000,0 0		35.941.868.618,0 0
		PILIHAN					
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN			21.403.643.224,0 0		29.237.368.618,0 0
		BIDANG PERDAGANGAN					
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG	-	-	17.274.507.579,0 0	-	19.806.017.704,0 0
		URUSAN PEMERINTAHAN					

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

		DAERAH PROVINSI					
	3.30.01.1.01	Perencanaan,	-	-	627.999.992,00	-	633.246.462,00
		Penganggaran, dan Evaluasi					
		Kinerja Perangkat Daerah					
	3.30.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
			<i>Jumlah Dokumen</i>	6 Dokumen	380.000.000,00	6 Dokumen	407.996.462,00
			<i>Perencanaan Perangkat</i>				
			<i>Daerah</i>				
	3.30.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			<i>Jumlah Dokumen</i>	6 Dokumen	43.000.000,00	6 Dokumen	40.250.000,00
			<i>RKA-SKPD dan Laporan</i>				
			<i>Hasil Koordinasi Penyusunan</i>				
			<i>Dokumen RKA-SKPD</i>				
3.30.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	6 Laporan	34.999.992,00	6 Laporan	35.000.000,00
3.30.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			<i>Jumlah Laporan</i>	44 Laporan	170.000.000,00	44 Laporan	150.000.000,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan	-	-	14.013.222.049,00	-	14.221.752.883,00
		Perangkat Daerah					
	3.30.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	15	16

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	14 Orang/ Bulan	13.605.613.049,00	14 Orang/ Bulan	13.847.207.083,00
	3.30.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	298.080.000,00	12 Dokumen	322.795.800,00
	3.30.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester</i>	4 Laporan	109.529.000,00	4 Laporan	51.750.000,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			<i>n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				
	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik	-	-	64.115.580,00	-	46.000.000,00
		Daerah pada					
		Perangkat Daerah					
	3.30.01.1.03.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada					
	6	SKPD					
			<i>Jumlah Laporan</i>	33 Laporan	64.115.580,00	33 Laporan	46.000.000,00
			<i>Penatausahaan Barang Milik</i>				
			<i>Daerah pada SKPD</i>				

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian	-	-	237.978.000,00	-	363.184.375,00
		Perangkat Daerah					
	3.30.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut					
		Kelengkapannya					
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	130.900.000,00	1 Paket	150.434.375,00
	3.30.01.1.05.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil</i>	5 Dokumen	35.478.000,00	5 Dokumen	40.250.000,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	15	16
	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
			Jumlah Pegawai	30 Orang	71.600.000,00	30 Orang	172.500.000,00
			Berdasarkan Tugas dan				
			Fungsi yang Mengikuti				
			Pendidikan dan Pelatihan				

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

	3.30.01.1.06	Administrasi Umum	-	-	931.911.958,00	-	858.044.384,00
		Perangkat Daerah					
	3.30.01.1.06.000	Penyediaan Komponen Instalasi					
1		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	80.556.400,00	1 Paket	34.500.000,00
	3.30.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
2							
			Jumlah Paket Peralatan	1 Paket	203.812.558,00	1 Paket	47.464.803,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			<i>dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				
	3.30.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	5 Paket	84.668.000,00	5 Paket	72.030.250,00
	3.30.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan					
		Perundang-Undangan					
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang</i>	1 Dokumen	9.875.000,00	1 Dokumen	9.560.881,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			<i>Disediakan</i>				
	3.30.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
			<i>Jumlah Laporan</i>	12 Laporan	553.000.000,00	12 Laporan	464.488.450,00
			<i>Penyelenggaraan Rapat</i>				
			<i>Koordinasi dan Konsultasi</i>				
			<i>SKPD</i>				
	3.30.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

1	2	3	4	8	9	15	16
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0,00	12 Dokumen	230.000.000,00
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik	-	-	204.000.000,00	-	1.615.750.000,00
		Daerah Penunjang					
		Urusan Pemerintah Daerah					
	3.30.01.1.07.000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	30 Unit	0,00	30 Unit	575.000.000,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			<i>Jabatan yang Disediakan</i>				
	3.30.01.1.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1 Unit	0,00	1 Unit	632.500.000,00
	3.30.01.1.07.000 5	Pengadaan Mebel					
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	2 Paket	0,00	2 Paket	5.750.000,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

3.30.01.1.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit	204.000.000,00	5 Unit	115.000.000,00
3.30.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	0,00	1 Unit	287.500.000,00
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang	-	-	-	669.000.000,00	-	854.524.576,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

		Urusan					
		Pemerintahan Daerah					
	3.30.01.1.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	154.000.000,00	1 Laporan	80.500.000,00
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	15	16

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

3.30.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	380.000.000,00	12 Laporan	618.774.576,00
3.30.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	135.000.000,00	12 Laporan	155.250.000,00
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	-	526.280.000,00	-	1.213.515.024,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	3.30.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
			<i>Jumlah Kendaraan</i>	30 Unit	370.480.000,00	30 Unit	271.244.750,00
			<i>Perorangan Dinas atau</i>				
			<i>Kendaraan Dinas Jabatan</i>				
			<i>yang Dipelihara dan</i>				
			<i>Dibayarkan Pajaknya</i>				
	3.30.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang</i>	5 Unit	19.800.000,00	5 Unit	23.408.250,00
			<i>Dipelihara dan</i>				
			<i>Dibayarkan Pajak dan</i>				
			<i>Perizinannya</i>				

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

3.30.01.1.09.000 5	Pemeliharaan Mebel						
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	5 Unit	0,00	5 Unit	28.750.000,00
3.30.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	20 Unit	136.000.000,00	20 Unit	85.112.024,00
3.30.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	0,00	1 Unit	517.500.000,00
	3.30.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	15	16
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	0,00	1 Unit	287.500.000,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN	-	-	70.000.000,00	-	897.000.000,00
		DAN PENDAFTARAN					
		PERUSAHAAN					
	3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	-	-	0,00	-	195.500.000,00
	3.30.02.1.01.000 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			<i>Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	3 Dokumen	0,00	3 Dokumen	195.500.000,00
	3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah	-	-	0,00	-	276.000.000,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

		Provinsi					
	3.30.02.1.02.000 1	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	5 Dokumen	0,00	5 Dokumen	138.000.000,00
	3.30.02.1.02.000 3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					
			<i>Jumlah Pemenuhan</i>	4 Dokumen	0,00	4 Dokumen	138.000.000,00
			<i>Komitmen Pemeriksaan</i>				
			<i>Sarana Distribusi Bahan</i>				
			<i>Berbahaya Pedagang</i>				

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission				
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	15	16
	3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha	-	-	70.000.000,00	-	253.000.000,00
		Perdagangan Bahan					
		Berbahaya Pengecer					

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

		Terdaftar					
3.30.02.1.03.000 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						
			<i>Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission</i>	4 Dokumen	0,00	4 Dokumen	138.000.000,00
3.30.02.1.03.000 2	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya						
			<i>Jumlah Pemenuhan</i>	1 Dokumen	70.000.000,00	1 Dokumen	115.000.000,00
			<i>Komitmen Pemeriksaan</i>				
			<i>Sarana Distribusi Bahan</i>				
			<i>Berbahaya Pedagang</i>				

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			<i>Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission</i>				
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	-	-	0,00	-	172.500.000,00
	3.30.02.1.04.000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA					
			<i>Jumlah Dokumen</i>	20 Dokumen	0,00	20 Dokumen	172.500.000,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			Penerbitan Surat Keterangan Asal				
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN	-	-	0,00	-	172.500.000,00
		SARANA DISTRIBUSI					
		PERDAGANGAN					
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan	-	-	0,00	-	172.500.000,00
		Pengelolaan Pusat Distribusi					
		Regional dan Pusat Distribusi					
		Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas					

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

	3.30.03.1.01.000 3	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas					
			Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	30 Orang	0,00	30 Orang	172.500.000,00
4.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI	-	-	847.938.000,00	-	4.175.693.700,00
		HARGA BARANG					
		Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

1	2	3	4	8	9	15	16
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan	-	-	80.000.000,00	-	230.000.000,00
		Barang Kebutuhan Pokok					
		dan Barang Penting di					
		Tingkat Daerah Provinsi					
	3.30.04.1.01.000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor					
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i>	11 Laporan	80.000.000,00	11 Laporan	138.000.000,00
	3.30.04.1.01.000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor					

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i>	66 laporan	0,00	66 laporan	92.000.000,00
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga,	-	-	685.000.000,00	-	3.372.375.000,00
		Informasi Ketersediaan Stok					
		Barang Kebutuhan Pokok					
		dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi					

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

		Perdagangan					
	3.30.04.1.02.000 2	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
			<i>Jumlah Laporan</i>	11 Laporan	685.000.000,00	11 Laporan	3.372.375.000,00
			<i>Pelaksanaan Operasi Pasar</i>				
			<i>dalam Rangka Stabilisasi</i>				
			<i>Harga Pangan Pokok yang</i>				
			<i>Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>				
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat	-	-	82.938.000,00	-	573.318.700,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

		Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya					
	3.30.04.1.03.000 2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi					
			<i>Jumlah Laporan</i>	4 Laporan	0,00	4 Laporan	172.500.000,00
			<i>Pengawasan Pengadaan</i>				
			<i>Pupuk dan Pestisida Tingkat</i>				
			<i>Daerah Provinsi</i>				
	3.30.04.1.03.000 3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi					

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	15	16
			Jumlah Laporan	11 Laporan	82.938.000,00	11 Laporan	95.378.700,00
			Pengawasan Penyaluran dan				
			Penggunaan Pupuk				
			Bersubsidi dengan Realisasi				
			Minimal 90%				
	3.30.04.1.03.000 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida					
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	8 Laporan	0,00	8 Laporan	201.940.000,00
			Pengawasan Pupuk				
			Bersubsidi dan				

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			<i>Pestisida</i>				
	3.30.04.1.03.000 5	Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi					
			<i>Jumlah laporan pemeriksaan persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi</i>	4 Laporan	0,00	4 Laporan	103.500.000,00
5.	3.30.05	PROGRAM	-	-	269.520.000,00	-	856.690.200,00
		PENGEMBANGAN					
		EKSPOR					
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi	-	-	269.520.000,00	-	856.690.200,00
		Dagang melalui Pameran					

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

		Dagang dan Misi Dagang					
		bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi					
	3.30.05.1.01.000 1	Pameran Dagang Internasional/Nasional					
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	6 Pelaku	100.000.000,00	6 Pelaku	230.000.000,00
				Usaha		Usaha	
	3.30.05.1.01.000 2	Pameran Dagang Lokal					
			Jumlah Pelaku Usaha	100 Pelaku	0,00	100 Pelaku	172.500.000,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			<i>yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal</i>	Usaha		Usaha	
	3.30.05.1.01.000 3	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan					
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan</i>	150 Pelaku Usaha	0,00	150 Pelaku Usaha	230.000.000,00
	3.30.05.1.01.000 4	Peningkatan Citra Produk Ekspor					
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

		KEGIATAN					
1	2	3	4	8	9	15	16
			<i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi</i>	20 Produk	169.520.000,00	20 Produk	224.190.200,00
6.	3.30.06	PROGRAM	-	-	2.370.895.145,00	-	3.038.767.139,00
		STANDARDISASI DAN					
		PERLINDUNGAN					
		KONSUMEN					
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan	-	-	781.263.100,00	-	1.026.257.700,00
		Konsumen di Seluruh Daerah					
		Kabupaten/Kota					

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

3.30.06.1.01.000 1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen						
			<i>Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif</i>	1 BPSK	330.000.000,00	1 BPSK	402.500.000,00
3.30.06.1.01.000 2	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen						
			<i>Jumlah Lembaga</i>	2 LPKSM	109.263.100,00	2 LPKSM	178.250.000,00
			<i>Perlindungan</i>				
			<i>Konsumen Swadaya</i>				
			<i>Masyarakat (LPKSM) yang Aktif</i>				

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

3.30.06.1.01.000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen						
			<i>Jumlah Pengaduan</i>	40	342.000.000,00	40	445.507.700,00
			<i>Konsumen yang Ditangani</i>	Pengaduan		Pengaduan	
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.389.632.045,00	-	1.763.375.739,00
3.30.06.1.02.000 4	Pengembangan Layanan Kalibrasi						
			<i>Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan</i>	500 Sertifikat	477.762.972,00	500 Sertifikat	484.794.925,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

	3.30.06.1.02.000 5	Pengembangan Layanan Pengujian					
			<i>Jumlah Laporan/Sertifikat</i>	501 laporan	750.000.000,00	501 laporan	873.931.381,00
			<i>Pengujian Mutu Barang yang</i>				
			<i>Diterbitkan</i>				
	3.30.06.1.02.000 6	Pemantauan Mutu Produk					
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

1	2	3	4	8	9	15	16
			Jumlah produk potensial yang dipantau	50 Produk	161.869.073,00	50 Produk	186.149.433,00
	3.30.06.1.02.000 7	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi					
			Jumlah Sertifikat	2 Sertifikat	0,00	2 Sertifikat	218.500.000,00
			Produk/person/sertifikat				
			Inspeksi yang Diterbitkan				
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan	-	-	200.000.000,00	-	249.133.700,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

		Barang Beredar dan/atau					
		Jasa di Seluruh Daerah					
		Kabupaten/Kota					
	3.30.06.1.03.000 3	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi</i>	9 Laporan	200.000.000,00	9 Laporan	249.133.700,00
7.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN	-	-	570.782.500,00	-	290.699.875,00
		DAN PEMASARAN					
		PRODUK DALAM NEGERI					

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi	-	-	460.782.500,00	-	187.199.875,00
		Produk Dalam Negeri					
	3.30.07.1.01.000 2	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi					
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri</i>	6 UMKM	460.782.500,00	6 UMKM	187.199.875,00
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran	-	-	25.000.000,00	-	28.750.000,00
		Penggunaan					

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

		Produk Dalam					
		Negeri					
	3.30.07.1.02.000 2	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi					
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i>	50 UMKM	25.000.000,00	50 UMKM	28.750.000,00
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

1	2	3	4	8	9	15	16
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan	-	-	85.000.000,00	-	74.750.000,00
		Penggunaan Produk Dalam					
		Negeri					
	3.30.07.1.03.000 5	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi					
			<i>Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer</i>	1 Laporan	85.000.000,00	1 Laporan	74.750.000,00
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN			3.145.308.776,00		6.704.500.000,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

		BIDANG PERINDUSTRIAN					
1.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan	-	-	2.844.217.436,00	-	5.922.500.000,00
		DAN PEMBANGUNAN					
		INDUSTRI					
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan,	-	-	2.844.217.436,00	-	5.922.500.000,00
		dan Evaluasi Rencana					
		Pembangunan Industri					
		Provinsi					
	3.31.02.1.01.000 1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi					
			<i>Jumlah Dokumen Rencana</i>	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	172.500.000,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			<i>Pembangunan Industri</i>				
	3.31.02.1.01.000 2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</i>	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	230.000.000,00
	3.31.02.1.01.000 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	1 Dokumen	1.005.622.428,00	1 Dokumen	1.092.500.000,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

	3.31.02.1.01.000 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	225.000.000,00	1 Dokumen	575.000.000,00
	3.31.02.1.01.000 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	1.490.595.008,00	1 Dokumen	3.680.000.000,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				
	3.31.02.1.01.000 6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri					
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	123.000.000,00	1 Dokumen	172.500.000,00
2.	3.31.03	PROGRAM	-	-	151.091.340,00	-	230.000.000,00
		PENGENDALIAN IZIN					
		USAHA INDUSTRI					
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin	-	-	151.091.340,00	-	230.000.000,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

		Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi					
	3.31.03.1.01.000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi					
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala	1 Dokumen	151.091.340,00	1 Dokumen	230.000.000,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			<i>usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</i>				
3.	3.31.04	PROGRAM	-	-	150.000.000,00	-	552.000.000,00
		PENGELOLAAN SISTEM					
		INFORMASI INDUSTRI					
		NASIONAL					
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi	-	-	150.000.000,00	-	552.000.000,00
		Industri untuk IUI, IPUI, IUKI,					

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

		dan IPKI Kewenangan					
		Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					
	3.31.04.1.01.000 1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	15	16
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup</i>	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	552.000.000,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

			Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				
	J U M L A H				24.548.952.000,0		35.941.868.618,0
					0		0

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPERINDAG PROVINSI JAMBI

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Rencana Program Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2025

N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	15	16
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			24.548.952.000,00		35.941.868.618,00
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			24.548.952.000,00		35.941.868.618,00
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			21.403.643.224,00		29.237.368.618,00
1	3.30 .01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	17.274.507.579,00	-	19.806.017.704,00
	3.30 .01. 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	627.999.992,00	-	633.246.462,00
	3.30 .01. 1.01 .000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					

1							
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6 Dokumen	380.000.000,00	6 Dokumen	407.996.462,00
3.30 .01. 1.01 .000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	6 Dokumen	43.000.000,00	6 Dokumen	40.250.000,00
3.30 .01. 1.01 .000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	6 Laporan	34.999.992,00	6 Laporan	35.000.000,00
3.30 .01. 1.01 .000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						

			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	44 Laporan	170.000.000,00	44 Laporan	150.000.000,00
	3.30 .01. 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	14.013.222.049,00	-	14.221.752.883,00
	3.30 .01. 1.02 .000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	15	16
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	14 Orang/ Bulan	13.605.613.049,00	14 Orang/ Bulan	13.847.207.083,00

3.30 .01. 1.02 .000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	298.080.000,00	12 Dokumen	322.795.800,00
3.30 .01. 1.02 .000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	4 Laporan	109.529.000,00	4 Laporan	51.750.000,00
3.30 .01. 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	64.115.580,00	-	46.000.000,00
3.30 .01. 1.03 .000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						

			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	33 Laporan	64.115.580,00	33 Laporan	46.000.000,00
	3.30 .01. 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	237.978.000,00	-	363.184.375,00
	3.30 .01. 1.05 .000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	130.900.000,00	1 Paket	150.434.375,00
	3.30 .01. 1.05 .000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	5 Dokumen	35.478.000,00	5 Dokumen	40.250.000,00

N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	15	16
	3.30 .01. 1.05 .000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	30 Orang	71.600.000,00	30 Orang	172.500.000,00
	3.30 .01. 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	931.911.958,00	-	858.044.384,00
	3.30 .01. 1.06 .000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	80.556.400,00	1 Paket	34.500.000,00

	3.30 .01. 1.06 .000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	203.812.558,00	1 Paket	47.464.803,00
	3.30 .01. 1.06 .000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	5 Paket	84.668.000,00	5 Paket	72.030.250,00
	3.30 .01. 1.06 .000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	9.875.000,00	1 Dokumen	9.560.881,00

	3.30 .01. 1.06 .000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	553.000.000,00	12 Laporan	464.488.450,00
	3.30 .01. 1.06 .001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	15	16
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	12 Dokumen	0,00	12 Dokumen	230.000.000,00
	3.30 .01. 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-	204.000.000,00	-	1.615.750.000,00

		Urusan Pemerintah Daerah					
3.30 .01. 1.07 .000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	30 Unit	0,00	30 Unit	575.000.000,00	
3.30 .01. 1.07 .000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1 Unit	0,00	1 Unit	632.500.000,00	
3.30 .01. 1.07 .000 5	Pengadaan Mebel						
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	2 Paket	0,00	2 Paket	5.750.000,00	

3.30 .01. 1.07 .000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit	204.000.000,00	5 Unit	115.000.000,00
3.30 .01. 1.07 .001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	0,00	1 Unit	287.500.000,00
3.30 .01. 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	669.000.000,00	-	854.524.576,00
3.30 .01. 1.08 .000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	154.000.000,00	1 Laporan	80.500.000,00

N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	15	16
	3.30 .01. 1.08 .000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	380.000.000,00	12 Laporan	618.774.576,00
	3.30 .01. 1.08 .000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	135.000.000,00	12 Laporan	155.250.000,00

3.30 .01. 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	526.280.000,00	-	1.213.515.024,00
3.30 .01. 1.09 .000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	30 Unit	370.480.000,00	30 Unit	271.244.750,00
3.30 .01. 1.09 .000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	5 Unit	19.800.000,00	5 Unit	23.408.250,00
3.30 .01. 1.09 .000 5	Pemeliharaan Mebel					
		<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	5 Unit	0,00	5 Unit	28.750.000,00

	3.30 .01. 1.09 .000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	20 Unit	136.000.000,00	20 Unit	85.112.024,00
	3.30 .01. 1.09 .000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	0,00	1 Unit	517.500.000,00
	3.30 .01. 1.09 .001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)

1	2	3	4	8	9	15	16
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	0,00	1 Unit	287.500.000,00
2	3.30 .02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	-	70.000.000,00	-	897.000.000,00
	3.30 .02. 1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	-	-	0,00	-	195.500.000,00
	3.30 .02. 1.01 .000 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					
			<i>Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	3 Dokumen	0,00	3 Dokumen	195.500.000,00

	3.30 .02. 1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	-	-	0,00	-	276.000.000,00
	3.30 .02. 1.02 .000 1	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	5 Dokumen	0,00	5 Dokumen	138.000.000,00
	3.30 .02. 1.02 .000 3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					
			<i>Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang</i>	4 Dokumen	0,00	4 Dokumen	138.000.000,00

			<i>Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission</i>				
N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	15	16
	3.30 .02. 1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	-	-	70.000.000,00	-	253.000.000,00
	3.30 .02. 1.03 .000 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					
			<i>Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission</i>	4 Dokumen	0,00	4 Dokumen	138.000.000,00

3.30 .02. 1.03 .000 2	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya						
			<i>Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission</i>	1 Dokumen	70.000.000,00	1 Dokumen	115.000.000,00
3.30 .02. 1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	-	-	-	0,00	-	172.500.000,00
3.30 .02. 1.04 .000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA						
			<i>Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal</i>	20 Dokumen	0,00	20 Dokumen	172.500.000,00

3	3.30 .03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	0,00	-	172.500.000,00
	3.30 .03. 1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	-	-	0,00	-	172.500.000,00
	3.30 .03. 1.01 .000 3	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas					
			Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	30 Orang	0,00	30 Orang	172.500.000,00
4	3.30 .04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	847.938.000,00	-	4.175.693.700,00
N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)

1	2	3	4	8	9	15	16
	3.30 .04. 1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	-	-	80.000.000,00	-	230.000.000,00
	3.30 .04. 1.01 .000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor					
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i>	11 Laporan	80.000.000,00	11 Laporan	138.000.000,00
	3.30 .04. 1.01 .000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor					
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i>	66 laporan	0,00	66 laporan	92.000.000,00
	3.30 .04. 1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok	-	-	685.000.000,00	-	3.372.375.000,00

		dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					
3.30 .04. 1.02 .000 2	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
			<i>Jumlah Laporan</i> <i>Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	11 Laporan	685.000.000,00	11 Laporan	3.372.375.000,00
3.30 .04. 1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	-	-	-	82.938.000,00	-	573.318.700,00
3.30 .04. 1.03 .000 2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi						
			<i>Jumlah Laporan</i> <i>Pengawasan Pengadaan</i>	4 Laporan	0,00	4 Laporan	172.500.000,00

			Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi				
	3.30 .04. 1.03 .000 3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi					
N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	15	16
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	11 Laporan	82.938.000,00	11 Laporan	95.378.700,00
	3.30 .04. 1.03 .000 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida					
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	8 Laporan	0,00	8 Laporan	201.940.000,00

	3.30 .04. 1.03 .000 5	Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi					
			<i>Jumlah laporan pemeriksaan persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi</i>	4 Laporan	0,00	4 Laporan	103.500.000,00
5	3.30 .05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-	269.520.000,00	-	856.690.200,00
	3.30 .05. 1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	-	-	269.520.000,00	-	856.690.200,00
	3.30 .05. 1.01 .000 1	Pameran Dagang Internasional/Nasional					
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i>	6 Pelaku Usaha	100.000.000,00	6 Pelaku Usaha	230.000.000,00

	3.30 .05. 1.01 .000 2	Pameran Dagang Lokal					
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal</i>	100 Pelaku Usaha	0,00	100 Pelaku Usaha	172.500.000,00
	3.30 .05. 1.01 .000 3	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan					
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan</i>	150 Pelaku Usaha	0,00	150 Pelaku Usaha	230.000.000,00
	3.30 .05. 1.01 .000 4	Peningkatan Citra Produk Ekspor					
N O	K O D E	U R U S A N / B I D A N G U R U S A N / P R O G R A M / K E G I A T A N / S U B K E G I A T A N	I N D I K A T O R P R O G R A M / K E G I A T A N / S U B K E G I A T A N	C A P A I A N K I N E R J A D A N K E R A N G K A P E N D A N A A N		P R A K I R A A N M A J U R E N C A N A T A H U N 2026	
				T A R G E T 2025	P A G U I N D I K A T I F (Rp)	T A R G E T	P A G U I N D I K A T I F (Rp)

1	2	3	4	8	9	15	16
			<i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi</i>	20 Produk	169.520.000,00	20 Produk	224.190.200,00
6	3.30 .06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	2.370.895.145,00	-	3.038.767.139,00
	3.30 .06. 1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-	781.263.100,00	-	1.026.257.700,00
	3.30 .06. 1.01 .000 1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen					
			<i>Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif</i>	1 BPSK	330.000.000,00	1 BPSK	402.500.000,00
	3.30 .06. 1.01 .000 2	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen					

			<i>Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif</i>	2 LPKSM	109.263.100,00	2 LPKSM	178.250.000,00
	3.30 .06. 1.01 .000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen					
			<i>Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani</i>	40 Pengaduan	342.000.000,00	40 Pengaduan	445.507.700,00
	3.30 .06. 1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.389.632.045,00	-	1.763.375.739,00
	3.30 .06. 1.02 .000 4	Pengembangan Layanan Kalibrasi					
			<i>Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan</i>	500 Sertifikat	477.762.972,00	500 Sertifikat	484.794.925,00

	3.30 .06. 1.02 .000 5	Pengembangan Layanan Pengujian					
			<i>Jumlah Laporan/Sertifikat</i> <i>Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan</i>	501 laporan	750.000.000,00	501 laporan	873.931.381,00
	3.30 .06. 1.02 .000 6	Pemantauan Mutu Produk					
N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	15	16
			<i>Jumlah produk potensial yang dipantau</i>	50 Produk	161.869.073,00	50 Produk	186.149.433,00

3.30 .06. 1.02 .000 7	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi						
			<i>Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan</i>	2 Sertifikat	0,00	2 Sertifikat	218.500.000,00
3.30 .06. 1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	200.000.000,00	-	249.133.700,00
3.30 .06. 1.03 .000 3	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga						
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi</i>	9 Laporan	200.000.000,00	9 Laporan	249.133.700,00
7 .3.30 .07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-	-	570.782.500,00	-	290.699.875,00
3.30 .07. 1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	-	-	-	460.782.500,00	-	187.199.875,00

3.30	.07.	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi					
1.01	.000						
2							
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri</i>	6 UMKM	460.782.500,00	6 UMKM	187.199.875,00
3.30	.07.	Pelaksanaan Pemasaran	-	-	25.000.000,00	-	28.750.000,00
1.02		Penggunaan Produk Dalam Negeri					
3.30	.07.	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi					
1.02	.000						
2							
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i>	50 UMKM	25.000.000,00	50 UMKM	28.750.000,00

N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	15	16
	3.30 .07. 1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	85.000.000,00	-	74.750.000,00
	3.30 .07. 1.03 .000 5	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi					
			<i>Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer</i>	1 Laporan	85.000.000,00	1 Laporan	74.750.000,00

	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			3.145.308.776,00		6.704.500.000,00
1	3.31 .02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	2.844.217.436,00	-	5.922.500.000,00
	3.31 .02 1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	-	-	2.844.217.436,00	-	5.922.500.000,00
	3.31 .02 1.01 .000 1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi					
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri</i>	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	172.500.000,00
	3.31 .02 1.01 .000 2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</i>	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	230.000.000,00

	3.31 .02. 1.01 .000 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	1 Dokumen	1.005.622.428,00	1 Dokumen	1.092.500.000,00
	3.31 .02. 1.01 .000 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>	1 Dokumen	225.000.000,00	1 Dokumen	575.000.000,00
	3.31 .02. 1.01 .000 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					
N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)

1	2	3	4	8	9	15	16
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	1 Dokumen	1.490.595.008,00	1 Dokumen	3.680.000.000,00
	3.31 .02. 1.01 .000 6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri					
			<i>Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>	1 Dokumen	123.000.000,00	1 Dokumen	172.500.000,00
2	3.31 .03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-	151.091.340,00	-	230.000.000,00
	3.31 .03. 1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	-	-	151.091.340,00	-	230.000.000,00

3.31 .03. 1.01 .000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi						
			<i>-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</i>	1 Dokumen	151.091.340,00	1 Dokumen	230.000.000,00
3	3.31 .04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	150.000.000,00	-	552.000.000,00
	3.31 .04. 1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-	150.000.000,00	-	552.000.000,00
	3.31 .04. 1.01 .000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					

1							
N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	15	16
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	552.000.000,00
		J U M L A H			24.548.952.000,00		35.941.868.618,00

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang at a Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD dan Rencana Strategis (RENSTRA).

Selain target RPJMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU), yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB (%)
2. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)
3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan (orang)
4. Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)
5. Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)
6. Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)
7. Persentase kinerja realisasi pupuk (%)
8. Tertib Usaha (%)
9. Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (USD Miliar)
10. Pertumbuhan nilai ekspor non migas (%)

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

11. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
12. Nilai SAKIP

Dalam mewujudkan kinerja tersebut diperlukan dukungan dalam hal ketersediaan anggaran kegiatan. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi ini merupakan masukan utama dalam menyusun RKA, KUA PPAS dan RAPBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024. Jika kebutuhan pendanaan dapat dipenuhi, semoga Rencana Kerja ini dapat direalisasikan oleh seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.



Jambi, Juli 2024
KEPALA DINAS

Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19721212 199302 1 001